



## Religiusitas Dalam Ruang Publik Agama Dan Politik Di Era Kontemporer

<sup>1)</sup> Hana Juhaida Aqila

<sup>1)</sup> Program Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Darussalam Gontor

Koresponden Email: [hanajuhaida@gontor.ac.id](mailto:hanajuhaida@gontor.ac.id)

Submitted : 15 Februari 2024

Revised: 26 Maret 2024

Accepted :30 Juni 2024

### Abstrak

*Religiusitas yang semakin mempengaruhi ruang publik telah menjadi fokus utama dalam polemik politik kontemporer. Artikel ini mengeksplorasi dinamika kompleks antara religiusitas, ruang publik, dan polemik politik dalam konteks saat ini. Religiusitas tidak hanya menciptakan identitas individu, tetapi juga memainkan peran yang signifikan dalam membentuk narasi politik dan agenda publik. Namun, kemunculan ekstremisme agama dan intoleransi sering kali memicu ketegangan dalam ruang publik, menantang nilai-nilai pluralisme dan toleransi. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memahami bagaimana religiusitas memengaruhi dinamika politik dan bagaimana pengaruh politik menciptakan lingkungan yang mempengaruhi ekspresi religiusitas dalam ruang publik. Dengan menelaah berbagai perspektif dan kontroversi, artikel ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang peran religiusitas dalam menciptakan pola pikir dan perilaku politik dalam era kontemporer yang kompleks ini.*

**Kata Kunci:** Religiusitas, Ruang Publik, Polemik Politik

### Abstrack

*Religiousness, which increasingly influences the public sphere, has become a major focus in contemporary political polemics. This article explores the complex dynamics between religiosity, the public sphere, and political polemics in the current context. Religiosity not only creates individual identities, but also plays a significant role in shaping political narratives and public agendas. However, the emergence of religious extremism and intolerance often triggers tensions in the public sphere, challenging the values of pluralism and tolerance. In the face of these challenges, it is important to understand how religiosity influences political dynamics and how political influences create an environment that affects expressions of religiosity in the public sphere. By examining various perspectives and controversies, this article aims to present a comprehensive picture of the role of religiosity in creating political mindsets and behaviors in this complex contemporary era.*

**Keywords:** Religiosity, Public Space, Political Polemics

## PENDAHULUAN

Agama dan politik merupakan dua elemen fundamental yang membentuk struktur dan norma masyarakat. Meskipun pemisahan agama dan negara telah menjadi topik perdebatan utama sejak masa Pencerahan, pada kenyataannya hubungan antara keduanya masih rumit dan penuh tantangan. Di masa sekarang, peran agama dalam kehidupan bermasyarakat semakin mendapat perhatian (Murniati 2015). Globalisasi, perkembangan teknologi, dan gejolak politik berdampak besar pada cara agama diterapkan dan ditafsirkan dalam masyarakat.

Di masyarakat, religiusitas berarti lebih dari sekedar keyakinan pribadi. Ia menjadi bagian dari identitas kolektif dan seringkali menjadi dasar pembentukan norma-norma sosial. Dengan kata lain, religiusitas di ruang



publik mencerminkan cara masyarakat memahami dan menerapkan ajaran agama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Kata politik sendiri kerap disandingkan dengan tradisi Barat, sedangkan istilah politik Islam selalu disandingkan dengan istilah khas yang merujuk kepada konsep-konsep Islam terutama merujuk kepada masa Nabi Muhammad dan juga para sahabat-sahabatnya (Ishomuddin 2013). Di banyak masyarakat, agama memberikan kerangka moral dan etika yang menjadi dasar hukum dan norma sosial. Dalam konteks ini, agama menciptakan sistem nilai yang membentuk perilaku dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Bagaimana religiusitas ini diintegrasikan ke dalam ranah politik merupakan pertanyaan sentral dalam perdebatan ini.

Di banyak negara, agama masih memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan dan memobilisasi masyarakat. Religiusitas dalam politik diwujudkan dalam berbagai cara, mulai dari partai politik keagamaan, gerakan sosial yang didukung oleh nilai-nilai agama, hingga pengaruh individu beragama dalam proses pengambilan keputusan politik. Pengaruh tersebut bisa positif atau negatif, tergantung pada penafsiran dan implementasi nilai-nilai agama dalam ranah politik (Utami dkk. 2022).

Agama dan politik, dua aspek penting dalam kehidupan manusia, mempunyai dampak besar terhadap individu dan masyarakat. Istilah agama mencakup aspek spiritual dan keagamaan seseorang, sedangkan politik mencakup pengorganisasian kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Hubungan antara agama dan politik telah menjadi fokus perdebatan dan analisis sepanjang sejarah manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang dikaji dengan beberapa referensi dari jurnal, buku yang relevan, dan beberapa gagasan dari penulis yang merasakan kehadiran dari masalah ini, sehingga tulisan ini dikaji dengan Library Research. Fenomena yang terkait pun terjadi di Indonesia yang menjadi perdebatan masyarakat akhir-akhir ini, karena menjadi perbincangan publik dan masyarakat, sehingga menyangkut masalah dari segi sosiologis pula.

Religiusitas mencakup keyakinan terhadap keberadaan Tuhan, ketaatan pada ajaran agama, dan partisipasi aktif dalam berbagai praktik keagamaan. Meskipun pada dasarnya religiusitas adalah sesuatu yang bersifat personal, yang melibatkan pengalaman spiritual setiap individu, ia juga memiliki dimensi kolektif yang penting, di mana religiusitas dapat memainkan peran dalam pembentukan identitas kelompok dan komunitas. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, ada beberapa isu yang perlu kita hadapi dan pecahkan, antara lain bagaimana definisi religiusitas dan politik dapat dipahami dalam konteks lokal, dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh para politisi di Indonesia, serta bagaimana nilai-nilai spiritualitas dapat diterjemahkan dan dimasukkan dalam polemik politik yang sering terjadi

## **METODE**

Dalam metode library research, kajian tentang hubungan antara religiusitas dan politik di ruang publik menyoroti interaksi kompleks antara kedua domain tersebut. Literatur yang tersedia menunjukkan bahwa dalam era kontemporer, agama sering kali menjadi faktor yang memengaruhi proses politik dan pembentukan kebijakan. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai mekanisme melalui mana agama dapat memengaruhi tindakan politik, termasuk melalui

partisipasi politik individu, pembentukan koalisi berbasis agama, dan penentuan kebijakan publik yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Selain itu, kajian ini juga mencermati konflik dan ketegangan yang muncul akibat perselisihan nilai antara agama dan politik, serta upaya untuk mencapai kesepakatan yang mengakomodasi pluralisme agama dalam konteks demokrasi modern. Dengan menggali sumber-sumber akademis, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang hubungan dinamis antara agama dan politik dalam ruang publik kontemporer

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Definisi Religiusitas dan Politik di Indonesia**

#### **a. Makna Religiusitas**

Menurut Etimologi, religiusitas berakar dari kata religi. Religi atau religion itu sendiri Kata berasal dari bahasa Latin dan akar kata relegere atau relegare, artinya mengikat. Disebut “religie” dalam bahasa Belanda, “dien” dalam bahasa Arab, dan “agama” dalam bahasa Indonesia. Kemudian menjadi kata sifat “religios” yang bermakna saleh dan agamis (Ahmad 2002). Religi adalah hubungan antara manusia dengan sesuatu di luar dirinya, yaitu Tuhan Yang Maha Mutlak, Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan Yang Maha Esa. Kata religiusitas berasal dari kata dasar religi, namun ada perbedaan antara religi atau agama dan religiusitas. Agama mengacu pada aspek formal yang terkait dengan aturan dan kewajiban, sedangkan religiusitas mengacu pada aspek keagamaan yang terinternalisasi dalam pikiran seseorang. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti adanya keyakinan manusia berdasarkan wahyu Ilahi.

Religiusitas mencerminkan situasi di mana seorang individu merasakan dan mengakui kehadiran kekuatan tertinggi yang mengawasi kehidupan manusia dan hanya mengandalkan dan berserah diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, keberagaman merupakan bentuk pengamalan dengan berbagai aspek agama dalam kehidupan nyata di dunia juga sebagai unsur keberagaman terdiri dari pengajaran, mata pelajaran, ruang, waktu, dan lingkungan (Nurul, 2016). Setiap unsur saling berinteraksi sehingga tercipta kesatuan dalam keberagaman. Religiusitas tidak terbatas pada ritual keagamaan saja. Ini mencakup banyak aspek yang membentuk pengalaman keagamaan seseorang. Menurut Glock dan Stark aspek-aspek tersebut meliputi komitmen terhadap keyakinan, pengalaman spiritual, praktik keagamaan (ritual), moral, dan nilai-nilai agama (Nasikhah dan Prihastuti t.t.).

Religiusitas merupakan unsur komprehensif, karenanya seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki agama atau beragama (being religion) dan bukan hanya sekedar mengakui bahwasannya ia memiliki agama (having religion). Namun Religiusitas meliputi aspek pengetahuan agama, perilaku moralitas dalam beragama, pengalaman beragama, dan sikap social keagamaan lainnya (Zhafira 2017). Dalam islam cerminan Religiusitas seseorang tampak dalam pengalaman akidahnya, akhlak serta syari'ahnya. Atau dengan tnda-tanda hadirnya Iman, Islam, dan Ihsan. Apabila tiga aspek itu hadir dalam diri seseorang maka berarti ia merupakan insan beragama (Malyuna dan Lubis 2023).

## **b. Makna Politik**

Politik, sebagai suatu organisasi dan sistem pengambilan keputusan dalam masyarakat, melibatkan interaksi antara individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ini tentang distribusi kekuasaan, pengambilan kebijakan, pengaturan dan pengendalian perilaku masyarakat. Secara etimologis, kata “politik” berasal dari kata Yunani “polis” yang berarti kota atau negara-kota. Kata “polis” telah berkembang menjadi kata seperti “politik” yang berarti warga negara dan “politisi” yang berarti kewarganegaraan. Politik adalah bidang atau domain yang berhubungan dengan pengaturan dan pengorganisasian hidup berdampingan dalam masyarakat. Pengertian politik mencakup berbagai aktivitas dan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi distribusi kekuasaan, sumber daya, dan nilai-nilai dalam suatu kelompok atau bangsa. Secara umum, politik mencakup tiga aspek utama: pemerintahan, politik, dan konflik

Politik mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pemerintah dalam sistem politik (negara). Hal ini mencakup proses penetapan tujuan sistem dan pengambilan keputusan, atau penetapan kebijakan umum bagi masyarakat. Dalam arti luas, politik adalah aktivitas yang diciptakan, dipelihara, dan digunakan untuk menegakkan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Politik juga dapat merujuk pada “serangkaian tujuan yang ingin dicapai” atau “metode dan arah kegiatan” yang lebih berorientasi politik. Dalam konteks yang lebih luas, politik juga dapat merujuk pada aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini mempunyai berbagai tujuan, antara lain kesejahteraan masyarakat, terselenggaranya sistem pendidikan, terpeliharanya keamanan dan perdamaian, serta tercapainya keseimbangan kehidupan sosial di dalam dan luar negeri (Nambo dan Puluwuluwa 2005).

Jika berbincang hubungan antara agama dan politik, ada tarik menarik kepentingan antara kedua entitas ini. Agama berperan strategis dalam membangun dan memberikan kerangka nilai dan norma dalam membangun struktur negara dan disiplin sosial. Negara menggunakan agama sebagai pembenaran sewenang-wenang untuk mewajibkan warga negara mengikuti aturan yang ada. Adanya hubungan timbal balik menyebabkan terjadinya hubungan saling mendominasi antara dua entitas. Negara yang dipimpin oleh kekuatan agama yang terlalu kuat hanya akan menciptakan negara teokrasi yang cenderung menimbulkan kemunafikan moral dan etika dari para pemimpin agamanya. Kondisi ini diakibatkan oleh campuran unsur teologis konservatif dan materialistis. Sebaliknya, negara yang menguasai hubungan keagamaan justru menciptakan negara sekuler (Prayudi 2016). Dengan kata lain, persoalan agama akan terpinggirkan dan pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan menurun, namun keduanya harus seimbang.

Politik pada hakikatnya merupakan fenomena yang selalu berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu beradaptasi dengan lingkungan dan berkembang secara dinamis. Sebagai anggota suatu masyarakat, individu atau kelompok secara kodrati terikat oleh nilai-nilai dan aturan-aturan umum yang diakui dan dipatuhi dalam masyarakat

tersebut. Oleh karena itu, politik selalu muncul dan muncul dalam proses pembangunan manusia (Sunaryo 2020).

Persoalan hubungan antara agama dan politik merupakan tema lama dalam sejarah umat manusia modern, berulang kali memunculkan perdebatan mengenai kedudukan agama dalam kancah politik yang melibatkan setidaknya dua kelompok yang bertentangan secara diametral. Salah satu partai politik berkomitmen untuk memasukkan agama dalam semua pertimbangan politik. Ide ini dikenal sebagai teokrasi, atau pemerintahan berbasis agama.

Akibatnya, agama menjadi payung utama bagi seluruh kebijakan politik. Di sisi lain, ada partai politik yang secara fundamental menolak campur tangan agama dalam politik. Agama harus disingkirkan dari perbincangan publik dan dipahami sebagai urusan privat yang hanyamenyangkut kepentingan pribadi. Agama tidak lebih dari sebuah ritual yang menjelaskan ketergantungan manusia pada Tuhan (Permana 2018). Namun, permasalahan politik yang terjadi di Indonesia tidak bisa kita singkirkan dari kata agama, karena peran agama dalam masyarakat yakni membangun moral dan sikap yang baik, sehingga politik perlu dicampuri dengan pesan religius dan agama.

## **2. Dinamika Agama dan Fenomenanya dalam Ranah Publik (Politik)**

Permasalahan, konflik dan segala relasi antara politik dan agama sangatlah menarik untuk dibicarakan. Agama dan politik merupakan dua substansi yang sangat berbeda, dari definisi, maksud, tujuan, latar belakang, dan keterkaitan diantaranya. Namun, hal itulah yang membuat para akademisi tertarik untuk membicarakan hal ini, dinamika antara ruang publik dan agama terus menerus muncul di era kontemporer ini. Dengan segala dinamika yang menyangkut tentang agama dan ranah publik, kita kembalikan dengan konteks negara kita yang berdemokrasi, yang dimana semua orang yang beragama maupun orang yang tidak beragama hidup rukun menanggapi satu wilayah ini.

Konflik kekerasan yang mengatasnamakan agama sudah sangat sering kita dengar, bahkan konten-konten FYP (For Your Page) yang tidak mendidik, dimasukkan unsur agama yang padahal sama sekali tidak tercermin atau diajarkan di agama tersebut, fatwa-fatwa politik yang terkesan otoritas diatasnamai dengan kata "Agama", dan masih banyak lagi kasus-kasus yang menyertai konteks agama.

Banyak pengalaman buruk yang telah disangkut-pautkan dengan agama, sehingga paradigma Agama yang seharusnya bersifat sakral dan suci telah luntur dari kesemua itu. Hal itu menjadikan agama yang dijadikan objek memiliki dogma buruk di kalangan publik. Dinamika agama yang dituduh sebagai provokator kebencian dan kekerasan diusung telah terjadi seperti kasus Terorisme dan Ekstremisme yang tidak luput kaitannya dengan agama, kekerasan yang dikontekskan dan disaratkan dengan agama telah melenceng dari unsur-unsur agama sendiri.

Jika kita mengingat kembali dasar negara kita yang memiliki lima Sila, kesemua Sila tersebut adalah eksistensi dan kepribadian negara kita, salah satunya adalah Ketuhanan, yang dimana negara kita berarti menjalankan syari'at sesuai keyakinan masing-masing agama, Piagam Jakarta dilaksanakan dengan tujuan untuk memperjelas struktur negara di masa yang akan datang (Rosadi 2019). Sudah jelas disini bahwa identitas negara kita mengakui adanya agama, dan agama tidak mungkin melenceng dari namanya kebenaran, realitas, dan

fakta. Namun, fenomena-fenomena ruang publik yang dikaitkan dengan agama telah banyak melenceng dari adanya kebenaran dan fakta.

Banyak kasus dalam ruang publik yang menjuru pada tujuan pragmatis salah satunya adalah politik identitas suatu negara, dinamika ini merupakan politik yang berfokus pada identitas yang berbeda golongan antara golongan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan (Lestari 2019). Dinamika tersebut berhasil menghasilkan fenomena di negara kita dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, tujuan pragmatis dalam Pemilu ataupun PILKADA diisukan untuk memenangkan suara dalam pemilihan umum dengan berbagai strategi.

Di Indonesia polemik Politik Identitas terjadi karena beberapa faktor, diantaranya dampak kebijakan pemerintah zaman Presiden Soekarno, pemerintah tidak fokus dalam membentuk karakter bangsa, yang dipikirkan hanya bagaimana membangun negara, sikap ambivalensi pemerintah dalam menghadapi isu negara dan agama, dan tidak adanya peran Parpol dalam proses demokrasi (Lestari 2019). Dalam hal ini politik identitas lebih dimaksudkan dengan kehilangannya Indonesia terhadap nilai-nilai yang ada di dasar negara yang sudah melekat menjadi karakteristik bangsa.

Hal lainnya, merebaknya pemikiran Liberalisme telah menjadikan sebagian masyarakat hanya mementingkan dirinya sendiri, setiap tindakannya hanya didorong oleh keinginannya sendiri tanpa memikirkan kepentingan dan kebutuhan orang lain, hal ini dilatarbelakangi oleh sikap manusia yang bersifat individualis (Redemptus B. 2019), yang mulanya ingin bekerja sendiri dan mendapat hasil untuk dirinya sendiri. Namun, dengan adanya paradigma keagamaan di tengah ruang publik, maka sistem etika dalam keagamaan dapat dijalankan, dengan memperhatikan kepentingan orang lain diatas kepentingan personal.

Selain itu, agama juga diharapkan dapat menjadi motivasi yang kuat dalam membentuk Solidaritas dan menangkis pemikiran Liberalitas. Agama harus dijadikan sebagai pandangan yang mendunia (*comprehensive worldview*), hal itu diperkuat dengan ritus keagamaan yang melibatkan semua warga agama, sehingga warga juga akan menyatu dengan segala latar belakang (Redemptus B. 2019).

Indonesia menjadi negara demokratis sekaligus negara dengan bermayoritaskan Muslim di dalamnya, ada kala isu politik dikaitkan dengan agama, tidak hanya ranah politik, banyak fenomena-fenomena yang muncul terkait ruang publik yang disalah-artikan urgensinya dan diatasnamakan dengan agama. Agama memiliki pandangan yang khusus dalam upayanya mewujudkan proses legitimasi yang dogmatic (Orjumi Moru 2022).

Dinamika lain agama dalam ranah publik di Indonesia adanya politisasi agama, yakni politik yang menggunakan ajaran, aturan, prinsip, teks, diskursus, dan simbol-simbol berbau keagamaan untuk tujuan politik secara praktis demi kekuasaan yang didapat. Dengan kata lain, nama agama dieksploitasi oleh individu ataupun kelompok demi tujuan pragmatis dan kekuasaan secara material (Qurtuby, 2018). Contohnya, dengan melibatkan agama dan tokoh agama untuk mendapatkan kursi kekuasaan, atau dengan cara mengampunahkan posisi dia agar unggul, alih-alih pelanggaran dalam memilih pemimpin yang berbeda agama. Hal itulah yang menjadikan polemik politik dengan modus mengatasnamakan agama.

Mayoritas masyarakat Indonesia yang merupakan seorang Muslim juga sangat tidak memperlmasalahkan jika agama bercampur dengan politik, bahkan menurut Mahmud Syaltout juga menegaskan bahwa Islam itu Diin Wa Daulah, yang berarti agama dan juga politik. Dalam Islam diajarkan konsep Kaffah, yang dimana pandangan yang meyakini Islam merupakan sebuah totalitas ajaran dan praktik dalam kehidupan (Baidhawiy 2012). sehingga politik yang dikontekskan adalah sebuah tanggung jawab dan praktik dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan dalam demokrasi kita yang lain diantaranya Demokrasi Liberal, Demokrasi ini lebih cenderung mengarah kepada pemikiran Sekularisme, yang mengantisipasi adanya unsur keagamaan yang masuk kedalam ranah politik. Padahal, Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4 kita mengatakan bahwa Sistem Pemerintahan kita tidaklah Sekuler, namun tidak juga terlalu religiulitas, ia mengemukakan mutual legitimacy atau paradigma fiqh dalam hubungan antara agama dan negara (Imadudin 2023).

Namun, jika pemikiran Sekuler saja tidak dapat meyakini bahwa nilai-nilai agama bisa meluruskan dan membawa kebijakan pemerintah dalam negara, maka dalam hubungan dan relasi antar-individu nilai keagamaan harus dibawa dan menjadi inti dalam ruang publik di Indonesia, karena pada dasarnya nilai Religiulitas adalah karakteristik bangsa yang merupakan dasar negara Sila pertama, dalam nilai Religiulitas diberikan dan dipaparkan sistem etika, dimana urgensi agama bukan untuk mengancam sistem pemerintahan ataupun partai politik, namun nilai keagamaan yang dikontekskan dapat berurusan dengan politik itu sendiri, sehingga nilai-nilai dasar dan pandangan suatu negara harus memiliki landasan keagamaan.

Dari segala dinamika politik yang mengatas namakan agama, kita juga perlu tahu Batasan-batasan agama dalam bertindak dan kontribusinya dalam politik, Dalam pandangan ahli Sosiologi, Charles Glock dan Rodney Stark dalam Religion and Tension in Society, mereka mengatakan bahwa agama itu sangat multidimensi yang setidaknya memiliki lima dimensi utama, yaitu experiential (feeling), ritualistic (practice), ideological (belief), intellectual, dan consequential (ethical).

Sehingga dapat difahami disini, bahwa agama tidak terus menerus membahas hanya tentang moral, spiritual saja namun juga segala aspek kehidupan, salah satunya politik, kata “politik” sendiri tentu saja tidak melulu dimaknai sebagai “kekuasaan agung” atau aktivitas sebuah negara tetapi sebagai sebuah cara atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang guna meningkatkan status atau otoritas dalam sebuah kelompok tertentu (Al Qurtuby 2018). Menurut Charles dan Rodney dengan lima dimensi yang mereka kemukakan, ada poin yang dapat kita ambil, yakni mengambil jalan moderasi dalam urusan antara politik dan agama, moderasi beragama menempatkan kedua urusan tersebut lebih harmoni dan proporsional untuk keduanya dalam konteks sosial masyarakat.

### **3. Implementasi Nilai-Nilai Religiutas dalam Polemik Politik**

Dalam dunia peradilan di Indonesia salah satu asas yang harus selalu dijunjung tinggi adalah asas Pancasila “Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.” Bagaimana kita bisa menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kalau yang dimaksud hubungan keadilan dalam konsep Ketuhanan (nilai religiositas agama) tidak diketahui. Termasuk keyakinan masyarakat tentang domain dan wilayah yurisdiksi berlakunya asas

tersebut yang tidak hanya sebatas wilayah yurisdiksi duniawi akan tetapi berlaku di area kehidupan akhirat kelak. Dan mungkin hukum positif dapat diharapkan menegakkan asas tersebut jika wilayah yurisdiksi hukum positif tidak mengakui dan tidak terlibat di dalam wilayah esoterik tersebut (Jayadi 2019).

Secara ilmiah, ranah agama dan politik adalah dua bidang yang berbeda namun saling terkait. Dalam konteks bangsa Indonesia, terdapat kajian mengenai hubungan antara Islam dan politik, di mana Islam memengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk politik. Beberapa alasan yang berkaitan dengan politik dalam konteks Islam antara lain membebaskan negara Islam dari penguasa asing dan mendirikan negara Islam yang menerapkan hukum Islam serta sistem sosial masyarakat. Banyaknya keterkaitan antara politik dan agama harus dipahami bahwa tidak sepenuhnya integritas dan tidak sepenuhnya terpisah.

Pengertian ilmu politik adalah membahas pendalaman teori dan praktik politik secara gambaran dan analisis yang membahas tentang politik. Politik pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan berbagai aspek kehidupan karena secara langsung berhubungan dengan kehidupan. Walaupun demikian, ilmu politik juga berkembang dalam mempelajari gejala-gejala politik yang berada di masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika ada manusia disitulah gejala politik bermunculan (Efriza dan Indrawan 2021).

Pendekatan dalam Islam, agama dapat memengaruhi politik dengan membebaskan negara Islam dari penguasa asing dan mendirikan negara Islam yang menerapkan hukum Islam serta sistem sosial masyarakat. Selain itu, agama juga dapat memengaruhi perilaku pemilih dan sebab akibat signifikan antara afiliasi keagamaan dengan dukungan yang didapat (Isyraq, 2024). Namun, catatan penting bahwa keterkaitan antara agama dan politik dapat menjadi sumber konflik, terutama dalam konteks Indonesia di mana simbolisasi agama dan politik menjadi bagian dalam konflik. Meskipun begitu, keterkaitan antara agama dan politik dapat diamati. Sehingga banyaknya kekerasan dan ketidakpuasan yang berlanjut dengan politik.

Setiap negara pasti menginginkan sistem demokrasi yang baik, secara pengadilan negara Indonesia adalah negara hukum yang menghubungkan antara negara dan masyarakat. Tidak ada politik tidak ada negara, tidak ada negara tidak ada rakyat, tidak ada manusia tidak ada agama, tidak ada agama tidak ada keadilan. Sama halnya bagaimana negara mengatasi isu-isu politik yang sedang berlangsung pada negara tersebut. Baik dan buruknya para Lembaga pemerintahan atau hukum yang melakukan pelaksanaan hukumnya (Jayadi 2019).

Pemilihan umum merupakan suatu proses demokrasi dimana warga suatu negara memberikan suaranya untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan. Pemilihan umum ini sangat penting untuk berfungsinya sistem demokrasi, karena memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka. Hasilnya menentukan susunan pemerintahan untuk jangka waktu tertentu, setelah itu biasanya diadakan pemilihan umum lagi.

Isu-isu politik yang sedang ramai dalam pembicaraan di Indonesia pada saat ini adalah meliputi pemilu 2024. Semua para popularitas partai politik di pemilu akan dijadikan topik pembicaraan hangat dalam masyarakat dan berbagai Lembaga pemerintahan (Anon t.t.). Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Politisasi berarti membuat keadaan (perbuatan, gagasan, dan sebagainya)

bersifat politis. Dari pengertian ini dapat ditarik sebuah arti, dimana politisasi diartikan sebagai sebuah perbuatan baik berupa gagasan, ide, dan lain sebagainya menjadi bersifat politik. Jika politisasi dikaitkan dengan agama, maka, pengertian politisasi agama menjadi: suatu perbuatan baik perbuatan itu berupa gagasan, ide, pemahaman dan lain sebagainya yang berkenaan tentang keagamaan menjadi bersifat politik, bukan bersifat keagamaan lagi (Abdul Malik 2014).

Biasanya gejala politisasi agama lahir karena di awal tahun politik bermunculan Gerakan dari sosial media kemudian terwujud ke dalam dunia nyata. Elite politik menyadari bahwa banyak kegiatan religius yang memiliki tujuan politik diadakan untuk mendapatkan simpati dan suara umat. Sampai pembuatan yang berhubungan dengan Gerakan politisasi agama. Itu terjadi pada tahun 2019 yang memuncak perihal #2019GantiPresiden (Kurniawan 2018). Tetapi setelah 2019 presiden Jokowi memperingatkan kepada kita untuk pemilihan presiden tahun kedepan tidak boleh adanya kembali politisasi agama atau kampanye fanatik.

Tapi, para Lembaga-lembaga agama pemerintahan banyak yang andil ikut berpartisipasi berhubungan dengan politik dan agama dalam Pemilu 2024 diantaranya Lembaga FKUB (forum kerukunan umat beragama), MUI (Majelis Ulama Indonesia), Kemenag (Kementerian Agama), DEPAG (Departemen Agama), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

Perumpamaan dari lembaga forum kerukunan umat beragama atau lebih dikenal dengan FKUB sangat berperan aktif dalam pemilu 2024. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kemendagri menggelar Webinar berjudul “Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mendukung Sukses Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Aman, Damai dan Harmoni” secara virtual (Ngawi 2023).

Dalam artikel tersebut peran FKUB dalam PEMILU 2024 Kesbangpol Ngawi, Bahtiar berpendapat “FKUB mempunyai peran untuk Pemilu Indonesia 2024 harus baik berkualitas dari sisi proses maupun hasilnya. Karena Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi ditengah heterogenitas bangsa, peran FKUB dalam pemilu dianggap sangat strategis untuk menjaga stabilitas daerah. Disinilah penghubung antara kehidupan bermasyarakat dan beragama. Tantangan bagi Pemilu 2024 pada era kontemporer harapannya untuk soal kerukunan, sosial dan menjaga keberagaman agar tidak mengganggu dan tidak adanya gesekan perpecahan atau informasi hoaks karena menghadapi masalah komunikasi informasi dalam teknologi.”

Contoh Lembaga lain selain dari FKUB yaitu MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang mengambil peran menciptakan politik yang berbudaya di Indonesia. MUI mengadakan halaqah kebangsaan di aula buya hamka, kantor MUI, mengatakan “Media hari ini sangat berpengaruh dalam konteks konstruksi opini, tak terkecuali pemilu. Pentingnya media ambil peran juga sejalan dengan masyarakat Indonesia yang aktif menggunakan internet, yaitu sekitar 200 orang” (Indonesia 2023).

Gun Gun Heryanto adalah Wakil Ketua Infokom MUI dalam artikel Media Ambil Peran Strategis Ciptakan Politik yang Berbudaya beliau berpendapat “para generasi muda berandil besar dalam pemilu 2024 karena pengguna aktif media sosial dan perlu untuk membuat narasi yang positif terkait pemilu dalam media sosial. Seperti biasanya informasi dari masyarakat mengubah kebiasaan baru, dahulu mencari fatwa melalui buku atau datang langsung ke MUI sekarang mencarinya melalui fatwa via internet. Semuanya berubah lebih ke media sosial dan belum tentu fatwa internet membenarkan hukum-hukum islam.” Hubungan MUI dengan nilai religiutas harus memperkuat peningkatan dakwah pembenaran dalam fatwa informasi media website MUI. Jangan sampai para katalisator merubah informasi karena senjatanya mereka adalah media.”

Kesimpulan dari FKUB dan MUI mempunyai banyak persamaan dalam kesimpulan bahwa pemelihan umum 2024 akan didominasi oleh kaum muda yaitu gen y dan z karena pemegang teknologi via komunikasi di media sosial. FKUB dan MUI banyak mengambil peran dalam pembuatan narasi yang baik dalam websitenya. Harapannya tidak adanya narasi yang membuat hoaks informasi dan perpecahan. Selain FKUB dan MUI, Kementerian agama (Kemenag) juga ikut berperan dalam KPU (Komisi pemilihan Umum) dan pengawasan umum partisipatif pada pemilu 2024. Kementerian Agama yang berlokasi di Jakarta mendukung dan melibatkan proses demokrasi pemilu dalam penyuluhan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada artikel kementerian agama, beliau mengatakan “Kami mempunyai penyuluhan sebanyak 50 ribu. Dan sudah mempunyai hak suara madrasah Aliyah dan Institut maupun Universitas, selain Pendidikan. Kemenag mempunyai Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat kegiatan pemilu berlangsung.” Penggabungan Kementerian Agama dan KPU memerlukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mengembangkan demokrasi dan pemilu, karena KPU tidak bisa bertindak sendiri (Kemenag t.t.).

Selain keaktifan Kementerian Agama di Jakarta Kementerian agama kabupaten pengadaran juga berandil. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, Bapak H. Badruzzaman, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran. berpidato pada kegiatan “pemantauan dan sosialisasi partisipatif” dengan masyarakat di kabupaten tersebut.

Konsep pemilu 2024 Pangandaran tentang Implementasi Per Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipasi Masyarakat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). H. Badruzzaman berkata “ada tiga cara yang dilakukan bawaslu dalam melakukan penyuluhan. Pertama Kementerian agama Kabupaten Pangandaran akan mendorong para tokoh agama memberikan peringatan stop tindakan hoax, politisasi sara, ujaran kebencian, termasuk money politik menjelang pemilu serentak, langkah kedua adalah dengan melakukan mobilisasi untuk memantau pemilu bersih tanpa pelanggaran dalam bahayanya money politik dalam pandangan negara maupun agama terutama diseluruh desa pengadaran.

Yang ketiga menyampaikan paparannya terkait money politik dalam pemilu prespektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak benar dan dikategorikan riswayah atau suap. Karena jika ada money politik maka pemilu tidak mendatangkan

manfaat dan kebaikan, dalam kaidah ushul fiqh mengaitkan mudharatnya tidak sesaat tetapi bisa selamanya.” Bawaslu Pengandaran akan bekerja sama dengan pimpinan daerah Pangandaran untuk bertindak sebagai pemantau partisipatif dan memastikan terselenggaranya pemilu yang demokratis, bersih, dan jujur (Humas 2023).

Selain tiga Lembaga tersebut Lembaga KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia) ketua komisi kerasulan awam mendukung pemilu 2024 demokratis dan anti politik secara identitas. Pada saat pertemuan nasional (PERNAS) komisi kerasulan awam konferensi waligereja Indonesia 2022 melaksanakan di Pusat Pastoral Samadi, Jakarta Timur. Mgr. Vincentius Sensi Potokota selaku ketua komisi kerasulan awam beliau mengatakan “Kerasulan awam harus bergerak, menginspirasi, terlibat langsung di tengah kehidupan umat dan salah satu tugasnya dengan menghadirkan gereja dalam bidang sosial politik kepada umat. Dan melalui Gerakan ini para umat didorong agar aktif dalam karya-karya sosial politik yang dapat menginspirasi dan menghadirkan gereja di tengah masyarakat luas. Negara dan bangsa kita harus dapat melahirkan pemimpin nasional dari pemilu 2024.

Peran Pentingnya Kerasulan Awam yaitu tidak hanya menjalankan tapi dengan memberikan inspirasi imam. Kardinal Suharyo mengatakan “Allah menyampaikan kehendaknya lewat realitas sosial-politik yang tidak begitu saja mampu dan harus diterima dan dipahami maka perlu membaca situasi bersama.” (Jeharut, 2022). KWI dan Kemenag peran dalam pemilu 2024 hampir sama yaitu mengawasi pemilu 2024 dengan baik tapi walaupun dengan agama yang berbeda mereka berdamai dan tetap rukun tidak menyinggung satu sama lain. Demikian, para Lembaga pemerintahan agama yang ikut aktif berandil dengan ucapan terima kasih dari KPU maupun BAWASLU terhadap penyelenggaraan PEMILU 2024 yang akan datang.

## **KESIMPULAN**

Era kontemporer cenderung menunjukkan keberagaman besar dalam praktik keagamaan di ruang publik. Orang-orang dapat mengamalkan agama mereka dengan berbagai cara dan menjadi keutamaan dan kehidupan beragama saat ini. Walaupun terdapat saling keterkaitan antara agama dan politik. Politik dapat mempengaruhi interpretasi dan praktik agama, sementara agama juga dapat menjadi kekuatan yang memengaruhi kebijakan dan tindakan politik. Dan banyak kelompok agama yang ikut berandil dalam PEMILU 2024, mereka aktif terlibat dalam inisiatif sosial dan kemanusiaan di era kontemporer. Mereka tidak hanya berperan dalam ranah rohaniah, tetapi juga mencoba memberikan kontribusi positif dalam masyarakat secara keseluruhan.

Banyaknya perubahan dalam persepsi terhadap hubungan antara agama dan politik. Beberapa masyarakat mungkin lebih cenderung memisahkan keduanya untuk memastikan prinsip keberagaman dan keadilan, sementara yang lain mungkin mencari integrasi lebih erat antara nilai-nilai agama dan kebijakan politik. Dan demikian kesimpulan ini lebih mencakup pemahaman yang lebih luas tentang kebebasan beragama dalam konsep kerukunan dan moderasi beragama dalam kepolitik, yang melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman, tanpa diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. Dan pembahasan yang berkait tentang PEMILU 2024 yang akan datang bulan Febuari 2024 mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, Ariyandi Batubara. 2014. "Komodifikasi Agama dalam Ruang Politik di Seberang Kota Jambi." *Kontekstualita* 29(2):99.
- Ahmad, Jumal. 2002. "Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah."
- Al Qurtuby, Sumanto. 2018. "Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia." *Maarif Institute for Culture and Humanity* 13(2):12.
- Anon. t.t. "Survei Isu Politik | Databoks." Diambil 3 Januari 2024 (<https://databoks.katadata.co.id/publikasi/2023/10/16/survei-isu-politik>).
- Baidhaw, Zakiyuddin. 2012. "Memecahkan kebuntuan teoretik hubungan Islam dan politik." *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12(2):14.
- Efriza, dan Jerry Indrawan. 2021. *Pengantar Politik: Sebuah Telaah Empirik dan Ilmiah*. Bumi Aksara.
- Humas, Andri. 2023. "Kemenag Siap Kerahkan Penyuluh Agama dan Ormit dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2024." Diambil 4 Januari 2024 (<https://pangandaran.kemenag.go.id/kemenag-siap-kerahkan-penyuluh-agama-dan-ormit-dalam-pengawasan-partisipatif-pada-pemilu-2024/>).
- Imadudin, Muhammad. 2023. "Hubungan Agama dan Negara: Dialektik dan Dinamika Antara Paradigma." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 4(2):61. doi: 10.24853/independen.4.2.61-72.
- Indonesia, Majelis Ulama. 2023. "Media Ambil Peran Strategis Ciptakan Politik Yang Berbudaya." Diambil (<https://www.mui.or.id/baca/berita/media-ambil-peran-strategis-ciptakan-politik-yang-berbudaya>).
- Ishomuddin. 2013. "PEMAHAMAN POLITIK ISLAM STUDI TENTANG WAWASAN PENGURUS DAN SIMPATISAN PARTAI POLITIK BERASAS ISLAM DI MALANG RAYA." *Jurnal Humanity* 8(2).
- Jayadi, Ahkam. 2019. "PERAN NILAI-NILAI RELIGIOSITAS DALAM PEMBANGUNAN DAN PENEGAKAN HUKUM NEGARA." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6(1):1–25. doi: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.9355.
- Kemenag. t.t. "Kemenag Siap Bantu KPU Sukseskan Pemilu 2024." <https://www.kemenag.go.id>. Diambil 4 Januari 2024 (<https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-siap-bantu-kpu-sukseskan-pemilu-2024-GQvpz>).
- Kurniadi, Akbar, Tri Legionosuko, dan Wibisono Poespithadi. 2019. "Transformasi Konflik Sosial Antara Etnis Bali Dan Lampung Dalam Mewujudkan Perdamaian Di Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9(1):91. doi: 10.33172/jpbh.v9i1.501.
- Kurniawan, Budi. 2018. "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Keberanian Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi." *Jurnal Sosiologi Agama* 12(1):133–54. doi: 10.14421/jsa.2018.121-07.
- Lestari, Dina. 2019. "Pilkada DKI Jakarta 2017 : Dinamika Politik Identitas di Indonesia." *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 4(4):5.

- Malyuna, Sita Isna, dan Masruroh Lubis. 2023. "Integrasi Materi Pembelajaran Iman, Islam, Dan Ihsan Dalam Upaya Mencegah Dekadensi Moral Di Era Digital." *Hikmah* 20(1):92–104. doi: 10.53802/hikmah.v20i1.197.
- Noer Rohmah. 2020. *PSIKOLOGI AGAMA*. Jakad Media Publishing.
- Murniati, Murniati. 2015. "Politik Islam Indonesia dan Tantangan Global." *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam* 7(1). doi: <https://doi.org/10.34001/an.v7i1.292>.
- Nambo, Abdulkadir B., dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa. 2005. "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)." *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan* 21(2):262–85. doi: 10.29313/mimbar.v21i2.177.
- Nasikhah, Duratun, dan Dra Prihastuti. t.t. "Hubungan antara Tingkat Religiusitas dengan Perilaku Kenakalan Remaja pada Masa Remaja Awal."
- Ngawi, Author Kesbangpol. 2023. "PERAN FKUB DALAM PEMILU." Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi. Diambil 4 Januari 2024 (<https://kesbang.ngawikab.go.id/2023/01/11/peran-fkub-dalam-pemi>